

DETERMINAN KEMISKINAN TAHUN 2012-2016
(Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

Marinda Maharani

Ekonomi Pembangunan
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

marindamaharani@yahoo.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Determinan Kemiskinan Tahun 2012-2016 studi kasus pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan dan yang menjadi variable independen terdiri dari empat variable, yaitu tingkat pengangguran, pendidikan, upah minimum kabupaten/kota dan kesehatan (angka harapan hidup). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect*). Berdasarkan hasil analisis, bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pendidikan dan Kesehatan (Angka Harapan Hidup) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Saran dalam penelitian ini untuk mengatasi kemiskinan adalah yang pertama pemerintah harus melakukan perbaikan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua pemerintah diharapkan membuka lapangan kerja berlebih hingga angka pengangguran dapat berkurang, yang ketiga yaitu penetapan upah minimum diharapkan dapat memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat dan terakhir kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh fasilitas kesehatan sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan.

Kata kunci :Kemiskinan, Upah Minimum, Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Determinants of Poverty in 2012-2016 with case studies in 35 districts/cities in Central Java Province. The dependent variable in this research is poverty and the independent variable consists of four variables, unemployment rate, education, district/city minimum wage and health (life expectancy). The analytical method used is panel data regression using a fixed effect model. Based on analysis result, that the minimum wage variable of district/city, education and health (life expectancy) have a significant negative effect to poverty level in Central Java Province. While the unemployment variable has a positive and significant effect on the level of poverty in Central Java Province. Suggestions in this research to overcome poverty is the government must improve the quality of education to improve the quality of human resources, the government is expected to open up the excessive employment so that unemployment can be reduced. The determinant of minimum wages is expected to meet standard of living needs that are feasible for the community and finally the ease of access for the community to obtain health facilities is needed to overcome poverty.

Keywords: Poverty, Minimum Wage, Unemployment, Education, Health.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di seluruh belahan dunia terutama terjadi di dunia berkembang seperti Negara Indonesia dan kemiskinan termasuk permasalahan yang sangat beragam dan rumit sepanjang sampai saat ini. Kesadaran tentang kemiskinan merupakan suatu cerminan atau gambaran dalam suatu negara yang dapat menggambarkan bahwa Negara tersebut merupakan Negara yang belum dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya yang tercantum dan didasarkan pada GBHN 1993 menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah membangun bangsa yang mandiri, sejahtera dan maju (Ardianto, 2016).

Kemiskinan masih merupakan masalah yang dialami seluruh belahan dunia terutama lebih sering terjadi pada negara berkembang. Kemiskinan terjadi tidak hanya berkaitan dengan orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak atau tidak dapat

membayai kebutuhan hidupnya akan tetapi juga berkaitan dengan adanya ketimpangan penghasilan antar masing-masing penduduk (Hudiyanto, 2014).

Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi lebih pada ketimpangan dan pengangguran tetapi juga merupakan suatu masalah klasik yang besar dan mendasar bagi negara-negara berkembang di dunia seperti negara Indonesia. Beberapa pakar di bidang ilmu ekonomi dan sosial telah mengembangkan dan membuat formulasi dengan menciptakan berbagai macam indikator dan parameter untuk menghitung jumlah penduduk dan mengukur tingkat kemiskinan suatu negara (Hudaya, 2009).

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh belum maksimalnya upaya pemerintah dalam menemukan dan menerapkan cara untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan masyarakat belum memahami betul bagaimana cara yang dapat masyarakat lakukan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan yang paling nyata dan kerap sekali terjadi di Indonesia yaitu kegiatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Korupsi mengakibatkan dana yang dialokasikan oleh pemerintah yang semestinya dipergunakan untuk mengatasi kemiskinan akan berkurang banyak sekali bagian yang dapat langsung sampai dan dipergunakan oleh masyarakat sehingga dana yang dialokasikan pemerintah kepada masyarakat tidak dapat dipergunakan secara maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi tingkat kemiskinan (Wiguna, 2013).

Dilihat dari sisi lain pendidikan ialah salah satu modal untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dalam skala besar bagi negara dan kesejahteraan dalam skala kecil bagi diri sendiri. Jika tingkat kemiskinan suatu negara meningkat, maka hal itu disebabkan karena tingkat pendidikan dalam negara tersebut rendah. Dengan kurangnya modal pendidikan yang dimiliki dan kemampuan diri yang mumpuni, maka masyarakat

sebagai pribadi pelaku ekonomi hanya mampu berusaha di dalam suatu bidang pekerjaan saja untuk membiayai kehidupan mereka dan masyarakat tidak memiliki tingkat intelektual tinggi untuk mengembangkan usaha di bidang ekonomi lainnya.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sebagai negara berkembang. Di negara Indonesia, jumlah penduduk miskin tercatat masih sangat banyak dan sebagian besar memiliki tempat tinggal di pedesaan dengan akses yang sulit tidak hanya itu, di daerah perkotaan dalam Provinsi Jawa Tengah penduduk miskin yang tinggal disitu masih tersebar cukup banyak.

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Indonesia yang pembangunannya di wilayah ini terbilang relatif cepat selama ini jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Dibalik pembangunan yang cepat tersebut, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa juga lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya (Ardianto, 2016).

Berikut tabel data penduduk miskin provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan perbandingan penduduk miskin nasional dari tahun 2015-2016.

Tabel 1.1
Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa Tahun 2015-2016

No.	Provinsi/Nasional	2015		2016	
		(ribu jiwa)	(%)	(ribu jiwa)	(%)
1.	DKI Jakarta	412.790	4,09	358.670	4,09
2.	banten	649.190	5,51	690.660	5,75
3.	Jawa Barat	4.238.960	9,18	4.485.660	9,57
4.	Jawa Timur	4.748.420	12,28	4.775.970	12,28
5.	Jawa Tengah	4.561.820	13,58	4.505.780	13,32
6.	D.I.Yogyakarta	532.580	14,55	485.560	13,16
Nasional		27.727.780	10,96	28.513.600	11,13

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2016 jumlah penduduk miskin yang paling sedikit yaitu tahun 2015 sebesar 4,09% dari total penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta, dan pada tahun 2016 masih stagnan di tingkat presentase kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 4,09%.

Posisi kemiskinan yang ada di Pulau Jawa tidak terpengaruh oleh rendahnya tingkat persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Posisi teratas atau yang paling sedikit angka kemiskinan yang ada yaitu Provinsi DKI Jakarta jika dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa lainnya, bahkan angkanya jauh dari tingkat kemiskinan nasional artinya, Provinsi DKI Jakarta telah dikatakan berhasil dalam hal pembangunan dikarenakan angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta berhasil menyentuh angka di bawah 10%.

Angka kemiskinan Jawa Tengah masih jauh dari harapan. Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih berada di atas angka 10% masih terpaut jauh sekali dengan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut bahwa kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 13,58% dari jumlah penduduk miskin. Angka tersebut masih jauh dari angka nasional 2015 sebesar 10,98%. Masih sama halnya ditahun berikutnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terbilang masih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan nasional dan dibandingkan pula dengan tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta, hal tersebut dapat disebabkan karena tidak meratanya pembangunan daerah yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih berada di atas angka 10%. Pembangunan di suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga berada dibawah 10%.

Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil dalam menangani masalah kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatiannya terhadap upaya pengentasan kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah mengingat tingkat kemiskinan yang masih tinggi di provinsi tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan guna menurunkan tingkat kemiskinan yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif dapat menurunkan tingkat kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Pemerintah telah membuat kebijakan mengeluarkan Undang-Undang dan beberapa program nasional yang di dalamnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, kesehatan serta upah minimum. (Sumodiningrat, 1999)

Di bidang ketenagakerjaan, beberapa kebijakan telah dibuat guna mengentaskan masalah kemiskinan salah satunya adalah kebijakan upah minimum. Tujuan penerapan kebijakan upah minimum daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan upah minimum lebih ditujukan pada pencapaian kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan tingkat produktivitas seseorang dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oleh sebab itu, tujuan pemerintah menerapkan kebijakan upah minimum adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, dengan cara menghitung kebutuhan dasar masyarakat dan sebagai pelindung sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dan transportasi.

Tabel 1.2
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 (Rupiah)

Tahun	KHL	UMK
2012	650.603	620.705
2013	726.350	701.300
2014	841.890	800.538
2015	940.375	914.275
2016	1.0777793	1.066.603

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Tingkat Upah Minimum dan kebutuhan hidup layak meningkat tiap tahunnya, dapat dilihat pada Tabel 1.2, pada tahun 2012 sebesar Rp. 650.603, mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu menjadi sebesar Rp. 726.350. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp.841.890 dan terus meningkat pada tahun 2015 tingkat upah minimum sebesar Rp. 914.275 dan meningkat menjadi Rp. 1.066.603 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengurangi jumlah pengangguran yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan dengan meningkatkan tingkat upah minimum setiap tahunnya, namun hal tersebut dirasa masih belum mencukupi kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat. Sehingga angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi. Maka dari itu, diperlukan kerjasama pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah untuk menyikapi penetapan upah minimum dengan tujuan mensejahterakan, serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan mengontrol peningkatan laju perekonomian dengan baik. Upah tenaga kerja yang didapat rendah dan dirasa belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang menyeluruh dikarenakan beberapa hal seperti masih rendahnya tingkat efisiensi masing-masing perusahaan, menyangkut pada masih rendahnya keahlian masing-masing pekerja, dan menyangkut pada sistem pengupahan yang tidak tepat. (Sumarlin, 2010)

Tidak hanya Upah Minimum Kabupaten/Kota, jumlah pengangguran yang berkurang juga dapat menurunkan angka kemiskinan di suatu negara atau wilayah. Pengangguran ialah seseorang atau sekelompok orang yang sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Dua hal ini, pengangguran dan kemiskinan merupakan dua masalah yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila tingkat pengangguran bertambah, maka akan turut menambah angka kemiskinan karena pengangguran merupakan seseorang yang tidak memiliki pendapatan sehingga seseorang tersebut tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. (Wiguna, 2013)

Tabel 1.3
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	TPT (%)	TPAK (%)
2012	6,21	70,60
2013	7,07	70,15
2014	5,61	71,26
2015	6,01	70,43
2016	5,68	69,68

Sumber : BPS Prov.Jawa Tengah Tahun 2016

Dilihat dari tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2012 angka TPT Jawa Tengah sebesar 6,21%. Setelah itu meningkat pada tahun 2013 yaitu menjadi 7,07%. Namun sedikit berbeda pada tahun 2014, tingkat pengangguran di tahun ini mengalami penurunan menjadi 5,61%. Pada tahun 2015 menjadi sebesar 6,01% dan pada tahun 2016 angkanya menurun menjadi 5,68%. Dengan menurunnya tingkat pengangguran mengindikasikan jumlah pengangguran berkurang dan laju perekonomian semakin baik.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, selama tiga

tahun terakhir angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terus mengalami penurunan, hal itu diindikasikan dengan menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut dimana orang yang aktif secara ekonomi semakin menurun tiap tahunnya. Berdasarkan table 1.3 angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 70,60% namun terjadi penurunan 0,45% di tahun 2013 menjadi 70,15%. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 71,26%, namun pada tahun 2015 menurun menjadi 70,43% dan terus menurun pada tahun 2016 hingga sebesar 69,68%, hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya masyarakat yang tergolong dalam angkatan pekerja yang aktif secara ekonomi.

Ada beberapa hal yang merupakan indikator dari kemiskinan yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pengangguran yang menjadi acuan dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang menjadi tonggak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun masih terdapat beberapa variabel lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan suatu wilayah atau negara salah satu contohnya yaitu variabel pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap ilmu dalam menerapkan teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2011). Pendidikan dapat mempengaruhi banyaknya pendapatan orang-orang yang berpendidikan dan juga menambah nilai produksi dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan berpengaruh pada pendapatan yang akan diterimanya nanti. Selain itu, pendidikan berpengaruh dengan seseorang dapat membaca, berpendapat, berkomunikasi dan seseorang akan lebih diperhitungkan oleh orang lain dan sebagainya. Oleh sebab itu, pendidikan sangat berperan penting dalam pembangunan perekonomian (Todaro, 2011).

Pengangguran dapat diatasi dengan tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer yang cukup penting, apabila tingkat pendidikan seseorang tinggi, maka seseorang tersebut tentunya akan mempunyai ilmu dan skill yang lebih memadai untuk siap bekerja. Selain itu, berani untuk bersaing dengan yang lain karena dianggap mempunyai keahlian yang lebih baik sehingga angka pengangguran berkurang dan secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pendidikan wajib belajar 9 tahun masih sangat perlu diterapkan untuk menunjang pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun bagi golongan orang kurang mampu dalam ekonomi. Dapat dilihat, fenomena yang terjadi sekarang tidak seimbangnya antara jumlah penduduk yang mencari pekerjaan dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga menuntut seseorang untuk memiliki skill dan ilmu yang lebih banyak agar dapat bekerja.

Tabel 1.4
Data Pendidikan yang Diplot Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2012	6,75
2013	6,78
2014	7,39
2015	6,93
2016	7,03

Sumber: BPS Prov.Jawa Tengah Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.4 diketahui bahwa indikator pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah mengalami perbedaan setiap tahunnya, dapat dikatakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah sudah cukup berhasil dalam mewajibkan program pendidikan dasar wajib 9 tahun meskipun tampaknya masih terdapat banyak pertanyaan besar mengenai penyerapan peserta didik melalui program pemerintah.

Perlunya pemerintah daerah melakukan pengkajian secara khusus mengenai besarnya daya serap pendidikan dan meningkatkan kualitas sebagai bentuk dari upaya untuk menggambarkan seberapa besar jumlah penduduk buta huruf dan aksara di Provinsi Jawa Tengah. Secara garis besar, pemerintah menggalakkan program pendidikan dasar wajib 9 tahun guna mengentaskan permasalahan penduduk buta huruf dan aksara di Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari segi fisik dan non fisik. Segi fisik disini yang dimaksudkan adalah kualitas fisik yang harus ditingkatkan, bisa melalui program kesehatan dan gizi. Sehingga diharapkan program tersebut berhasil dan dapat mempengaruhi angka harapan hidup manusia karena semakin sehat seseorang atau semakin baik gizi yang diterima seseorang maka akan semakin lama usia manusia sedangkan dari segi non fisik dapat dicerminkan melalui pendidikan yaitu sumber daya manusia yang ada perlu dikembangkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi peluang untuk seseorang memperoleh pekerjaan. Dalam hubungannya dengan tingkat kemiskinan, apabila semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dan kesehatan badan individu maka produktivitas individu tersebut akan meningkat, apabila produktivitas meningkat, mereka akan giat bekerja, dan dengan bekerja itu lah cara untuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dapat memenuhi kebutuhan ini lah, mereka dapat terhindar dari lingkaran kemiskinan. (R. Astuti, 2015)

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas, penelitian ini berusaha mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi upah minimum kabupaten/kota, tingkat pendidikan, pengangguran dan kesehatan (angka harapan hidup), yang sekiranya dapat membantu menurunkan dan memecahkan masalah kemiskinan. Oleh karena itu penulis mengambil judul “**DETERMINAN KEMISKINAN TAHUN 2012-2016 (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)**”.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum kabupaten/kota, pendidikan, dan kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2012-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan *software Eviews 7*. Obyek penelitian dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah yaitu terdiri dari 35 Kabupaten/Kota.

Metode analisis itu mencakup analisis itu mencakup regresi data panel menggunakan Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Teknik penafsiran model menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji asumsi klasik menggunakan Uji Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinearitas, dan Uji statistik analisis regresi menggunakan Uji (R^2), Uji F-Statistik dan Uji Parsial (t-Statistik). Model dasar yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + u \dots (3.1)$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen, yaitu Kemiskinan

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien

X1 : Variabel upah minimum kabupaten/kota

X2 : Variabel pengangguran

X3 : Variabel pendidikan

X4 : Variabel kesehatan

u : *error terms*

t : periode waktu t dimana periode waktunya tahun 2012-2016

i : subyek di Jawa Tengah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas mengartikan bahwa dalam suatu model terdapat perbedaan dari varian residual atas observasi. Di dalam model penelitian yang baik tidak terdapat heteroskedastisitas apapun.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua variable independen yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Sehingga keadaan ini menunjukkan bahwa terjadi homoskedastisitas atau adanya varian yang sama.

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas :

Tabel 5.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.830121	22.68756	0.168820	0.8662
Pd	0.110480	0.203469	0.542984	0.5880
TPT	-0.007449	0.020754	-0.358932	0.7202
LOG(UM)	-0.070188	0.298606	-0.235052	0.8145
AHH	-0.043650	0.331888	-0.131521	0.8956

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui adanya hubungan linear antara variabel independen di dalam model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas pada model, peneliti menggunakan metode parsial antar variabel independen. *Rule of thumb* dari metode ini adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi di atas 0,9 maka diduga terdapat multikolinearitas di dalam model penelitian ini. Namun sebaliknya apabila terdapat koefisien korelasi relatif rendah maka diduga tidak terdapat unsur multikolinearitas dalam model tersebut (Ajija at al, 2011).

Pendekatan multikolinearitas dilakukan dalam uji penyimpangan asumsi klasik dengan pendekatan atas signifikansi dan nilai dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Cara pembahasannya dengan menganalisis data yang digunakan oleh setiap variabel dan hasil dari olah data yang ada, data yang digunakan diantaranya data time series dan data cross section. Akan tetapi, biasanya multikolinieritas terjadi pada data runtut waktu (time series) dengan variabel yang digunakan. *Rule of Thumb* menjelaskan jika terdapat variabel yang tinggi sementara terdapat sebagian besar atau semua variabel secara parsial tidak signifikan maka pada model tersebut diduga terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2006).

Dalam penelitian perlu adanya uji yang digunakan untuk menguji ada atau tidak hubungan antar variable bebas yaitu dengan uji multikolinearitas.

Tabel 5.2.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	K	Pd	TPT	UM	AHH
K	1.000000	-0.599504	-0.088099	-0.411192	-0.618747
Pd	-0.599504	1.000000	0.087282	0.331524	0.652935
TPT	-0.088099	0.087282	1.000000	-0.234596	-0.210278
UM	-0.411192	0.331524	-0.234596	1.000000	0.220892
AHH	-0.618747	0.662935	-0.210278	0.220892	1.000000

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0

Berdasarkan table 5.2, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antar variable bebas $< 0,9$ hal tersebut berarti menjelaskan bahwa multikolinearitas pada model regresi ini tidak ada.

B. Analisis Pemilihan Model Terbaik

Metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain model *Fixed Effect Model (FEM)*, *Random Effect Model (REM)* atau *Pooled Least Square (PLS)*. Dari ketiga model regresi di atas yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, akan dipilih model regresi dengan hasil yang terbaik dalam hal menganalisis. Maka dari itu, dari ketiga model di atas manakah yang akan dipilih untuk menganalisis dalam penelitian ini harus dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan uji Chow dan uji Hausman.

1. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana dari model dua ini yang terbaik antara *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model*. Pengambilan keputusan dengan cara melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross-Section F. Jika nilai $p < 0,05$ maka

model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Tetapi jika $p > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model*.

Tabel 5.3
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	164.390530	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	654.498513	34	0.0000

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0

Berdasarkan Tabel 5.3 uji Chow diatas, kedua nilai probabilitas Cross Section F dan Chi square yang hasilnya lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi hal tersebut menunjukkan model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu uji hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan distribusi *chi-square* dan sedang dalam kondisi model *Random Effect*. Oleh sebab itu, hipotesis yang digunakan adalah :

Ho : *Random Effect*

HI : *Fixed Effect*

Apabila nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari alpha sebesar 5% maka Ho ditolak sehingga model yang tepat untuk dipilih dan digunakan adalah *Fixed Effect*. Hasil estimasi menggunakan uji Hausman sebagai berikut :

Tabel 5.4

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq.d.f	Prob
Cross-section random	21.505493	4	0.0003

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0

Hasil estimasi di atas menghasilkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0003 kurang dari alpha 0,05 sehingga H_0 ditolak sementara H_1 diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang tepat dipilih dan digunakan adalah model *fixed effect*.

C. Analisis Model Terbaik

Hasil pemilihan model menggunakan uji analisis terbaik selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.5Hasil Estimasi *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*

Variabel dependent: KEMISKINAN	Model		
	Common	Fixed	Random
Konstanta (C)	217.3526	261.2217	149.5671
Standar error	23.25614	41.95677	18.65837
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0000
Pendidikan	-0.475312	-1.093624	-1.015672
Standar error	0.268060	0.376281	0.306494
Probabilitas	0.0780	0.0043	0.0011
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-0.636737	0.095134	0.079814
Standar error	0.138796	0.038380	0.037950
Probabilitas	0.0000	0.0144	0.0369
Upah Minimum	-8.092487	-2.169979	-3.182415
Standar error	1.425870	0.552221	0.409029
Probabilitas	0.0000	0.0001	0.0000
Kesehatan (AHH)	-1.141099	-2.826236	-1.143579
Standar error	0.160572	0.613769	0.253607
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0000
R²	0.556612	0.989468	0.736039
F-statistic	53.35277	336.2252	118.5087
Prob (F-stat)	0.000000	0.000000	0.000000
Durbin-Watson Stat	0.183701	1.665879	1.198591

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0

Berdasarkan tabel diatas, dapat dianalisis bahwa hasil dari uji spesifik yang dilakukan menggunakan dua uji analisis yaitu uji Chow dan uji Hausman disimpulkan bahwa dari kedua uji tersebut sama-sama menyarankan untuk menggunakan fixed effect model. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 5.5, perbandingan antara ketiga model yaitu fixed effect, common effect, dan random effect bahwa nilai probabilitas pada masing-masing variable mengharuskan tidak lebih dari 0,05 atau (5%) dari tabel tersebut bahwa hanya fixed effect dan random effect yang pada masing-masing variabel tidak lebih dari 0,05 atau (5%). Selain daripada itu, alasan pemilihan model fixed effect juga dapat dilihat dari koefisien determinasi yang ada, yaitu seberapa besar variabel terikat dipengaruhi variabel bebas. Koefisien yang dimiliki model fixed effect sebesar 0.989468 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan kedua model estimasi yang lainnya.

D. Hasil Estimasi Model Data Panel

Berdasarkan hasil dari uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan mana yang terbaik antara *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)* maka model regresi data panel yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Pada pengujian sebelumnya, model yang digunakan telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil yang didapatkan setelah estimasi dapat konsisten dan tidak bias. Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 35 kabupaten/kota selama periode 2012 - 2016.

Tabel 5.6Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variabel dependent : KEMISKINAN	Model
	Fixed Effect
Konstanta (C)	261.2217
Standar error	41.95677
Probabilitas	0.0000
Pendidikan	-1.093624
Standar error	0.376281
Probabilitas	0.0043
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0.095134
Standar error	0.038380
Probabilitas	0.0144
Upah Minimum	-2.169979
Standar error	0.552221
Probabilitas	0.0001
Kesehatan (AHH)	-2.826236
Standar error	0.613769
Probabilitas	0.0000
R²	0.989468
F-statistic	336.2252
Prob (F-stat)	0.000000
Durbin-Watson Stat	1.665879

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap analisis pengaruh pendidikan, tingkat pengangguran (TPT), upah minimum dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$(Y) = f((X1), (X2), \text{Log}(X3), (X4))$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$(Y) = \beta_0 + \beta_1*(X1) + \beta_2*(X2) + \beta_3*\text{Log}(X3) + \beta_4*(X4) \text{ et}$$

$$(Y) = 261.2217 - 1.093624*(X1) + 0.095134*(X2) - 2.169979*\text{Log}(X3) + 2.826236*(X4) \text{ et}$$

Dimana:

KEMISKINAN = Tingkat kemiskinan

X1 = Pendidikan

X2 = Tingkat pengangguran

X3 = Upah minimum tingkat Kabupaten/Kota

X4 = Kesehatan

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien parameter

ϵ_t = Disturbance error

Dari hasil estimasi diatas, terlihat bahwa adanya pengaruh dari variabel cross-section yang berbeda di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dimana kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Temanggung, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang memiliki pengaruh efek cross-Setion (efek wilayah) yang bernilai positif.

Sedangkan wilayah yang bernilai negatif masing-masing yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Nilai cross-section menentukan seberapa besarnya pengaruh atau efek wilayah terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jika diurutkan dari wilayah yang paling besar memberikan kontribusi adalah Kota Surakarta sebesar 8.48302140399. Sedangkan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Kabupaten Pemalang yaitu sebesar -15.4435904394. Penambahan efek waktu dalam model analisis memberikan pengaruh yang setiap tahunnya berbeda-beda terhadap kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien variabel waktu yang tidak sama disetiap tahunnya.

A. Uji Statistik

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi determinasi (R^2), uji signifikansi bersama-sama (uji F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistic t).

1. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menginterpretasikan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan variasi variabel dependen.

Hasil regresi dari pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pendidikan (Pd) dan Kesehatan (AHH) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai tahun 2016 yang terlihat pada

tabel 5.6 diperoleh nilai R^2 sebesar 0.989468. Hal ini berarti bahwa 98,94% yang mampu dijelaskan oleh himpunan variasi variabel independen. Sedangkan 1,06% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

2. Uji Stimulan (F-statistik)

Uji F-statistik digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Eviews 7.0, diperoleh nilai F-Statistik sebesar 336.2252 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000 (signifikansi pada 5%). Apabila dilihat dari nilai probabilitas, hasil yang ada tersebut lebih kecil dari angka kepercayaan 5 persen, sehingga uji F dikatakan signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel pendidikan, tingkat pengangguran, upah minimum dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T-statistik)

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masing variabel bebas secara individu signifikan mempengaruhi variabel terikat. Perlu dilakukan uji t-statistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada umumnya, untuk ilmu sosial, termasuk ekonomi dan keuangan, besarnya α adalah 5% (Nachrowi dan Usman, 2006:15). Sebagai komplementer taraf kepercayaan adalah taraf signifikansi. Apabila kita dapat menerima keputusan dengan kepercayaan 95%, maka berarti bahwa kita harus bersedia menanggung risiko yang ada meleset 5% (Suharsimi,2006). Pengujian parsial dari setiap variabel independen menunjukkan pengaruh dari keempat variabel independen, yakni upah minimum, pengangguran terbuka, pendidikan dan kesehatan. Pengujian uji t dilakukan dengan

membandingkan antara nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Uji statistik t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut disajikan tabel uji statistik t Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kesehatan (AHH) dan Pendidikan (Pd) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 5.7
Hasil Uji T-statistik

Variabel	Koefisien regresi	Prob	Standar
Pendidikan	-1.093624	0.0043	5%
Tingkat Pengangguran	0.095134	0.0144	5%
Upah Minimum	-2.169979	0.0001	5%
Kesehatan	-2.826236	0.0000	5%

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil t-statistik untuk variabel independen sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki koefisien regresi sebesar -1.093624 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0043 yang berarti signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti bila variabel Pendidikan naik sebesar 1 persen maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -1.093624.
2. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran memiliki koefisien regresi sebesar 0.095134 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0144 yang berarti signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti bila tingkat pengangguran naik 1 persen maka menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0.095134.

3. Pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki koefisien regresi sebesar -2.169979 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0001 yang berarti signifikan pada $\alpha=5\%$. Hal ini bila upah minimum naik sebesar 1 persen maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -2.169979.

4. Pengaruh Kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa variable kesehatan memiliki koefisien regresi sebesar -2.826236 dengan nilai probabilitas sebesar -2.826235 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal bila kesehatan naik sebesar 1 persen maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -2.826236.

B. Uji Teori (Interpretasi Ekonomi)

Dari data yang diperoleh hingga pengujian yang sudah dilakukan, berdasarkan hasil penelitian diatas dengan menggunakan metode General Least Square (GLS) untuk mengetahui pengaruh pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum tingkat kabupaten/kota dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari hasil penelitian dengan pengolahan data panel menggunakan *fixed effect model* diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{KEMISKINAN} = 261.2217 - 1.093624 \text{ PENDIDIKAN} + 0.095134 \text{ TPT} - 2.169979 \text{ UPAH MINIMUM} - 2.826236 \text{ KESEHATAN}$$

Pada tabel 5.6 dan persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa koefisien konstanta sebesar 261.2217. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa variabel pendidikan (P) berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar -1.093624 terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti apabila ada kenaikan pendidikan sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar -1.093624 persen di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara variabel pendidikan dengan kemiskinan sehingga hipotesis diterima.

Sesuai dengan penelitian Musa Al Jundi (2014) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia dimana hasil tersebut bahwa variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah) berpengaruh negatif dan signifikan. Hubungan negatif dan signifikan antara pendidikan (rata-rata lama sekolah) terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa jika suatu individu memiliki kualitas pendidikan yang baik serta jenjang pendidikan yang tinggi maka akan semakin besar kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Karena apabila individu dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik maka segala kebutuhan dapat terpenuhi sehingga dapat terhindar dari kemiskinan.

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data yang sudah diolah diatas, bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.095134 menunjukkan bahwa apabila ada kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.095133 persen di Provinsi Jawa

Tengah. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan penelitian Priyo Adi Nugroho yang berjudul Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta dimana variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hubungan positif antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menurut Sadono Sukirno dalam Priyo Adi (2015) menunjukkan bahwa pengangguran dapat berdampak buruk pada berkurangnya pendapatan yang diperoleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh seseorang. Semakin turun kesejahteraan masyarakat karena menganggur maka akan meningkatkan peluang seseorang terjebak dalam kemiskinan. Karena semakin banyak orang yang menganggur maka angka kemiskinan pun meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan menurun.

1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil data yang sudah diolah, bahwa variabel upah minimum tingkat Kabupaten/Kota (UMK) menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada derajat kepercayaan 1 persen. Koefisien variabel upah minimum sebesar -2.169979, yang berarti bahwa bila terjadi peningkatan upah minimum sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -2.169979 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini yang menduga adanya pengaruh negatif antara upah minimum terhadap tingkat kemiskinan sehingga hipotesis diterima.

Sesuai dengan penelitian Musa Al Jundi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia yang menjelaskan tentang dimana variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

tingkat kemiskinan. Hubungan negatif antara upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah bahwa menurut Jundi (2014) menjelaskan bahwa semakin meningkatnya upah minimum yang ada di suatu daerah maka pendapatan masyarakat pun akan meningkat. Seiring dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh masyarakat, kesejahteraan masyarakat pun juga meningkat, sehingga dengan meningkatnya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat, hal itu akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Dengan menurunnya tingkat kemiskinan mengakibatkan rakyat menjadi makmur.

2. Pengaruh Kesehatan (Angka Harapan Hidup) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa variabel kesehatan (AHH) menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar -2.826236 yang berarti bahwa bila terjadi peningkatan kesehatan sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -2.826236 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang mengatakan bahwa kesehatan berhubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, maka dapat dikatakan hipotesis diterima.

Sesuai dalam penelitian Amelia (2012) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 – 2010 dimana variabel kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan negatif dan signifikan kesehatan (Angka Harapan Hidup) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka kesehatan atau semakin lama angka harapan hidup di suatu wilayah maka pembangunan kesehatan di daerah tersebut terkait fasilitas kesehatan semakin maju hal ini berarti tingkat

kesehatan yang ada dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga meningkatnya angka kesehatan, dan adanya perbaikan kesehatan maka dapat meningkatkan daya kerja, berkurangnya hari tidak bekerja, sehingga produktivitaspun dapat meningkat, karena produktivitas meningkat maka adanya peningkatan penghasilan dan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dimana nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Pendidikan dan AHH (Angka Harapan Hidup) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan metode analisis *Fixed Effect Model* dan penelitian ini diselesaikan melalui statistic computer, yaitu Eviews 7.0. Selanjutnya, berdasarkan hasil-hasil pengolahan data yang sudah dilakukan, dalam bab ini menggambarkan hasil estimasi terbaik karena hasil ini dapat memenuhi kriteria teori ekonomi, statistik maupun ekonometri.

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan dari pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2012-2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Pendidikan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemiskinan di

Provinsi Jawa Tengah. Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, hasil tersebut sesuai dengan hipotesa yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
3. Hasil penelitian menunjukkan variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4. Hasil penelitian menunjukkan variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini sama dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Angka Harapan Hidup atau kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga peneliti menyarankan supaya pemerintah harus melakukan perbaikan mutu

pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat yang diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Semakin tingginya kualitas pendidikan maka tingkat kemiskinan yang ada dapat berkurang karena didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang meningkat.

2. Berdasarkan hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Apabila Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkurang maka tingkat kemiskinan juga ikut menurun. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran yang ada membuktikan bahwa sumber daya manusia lebih produktif sehingga masing-masing individu mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Berdasarkan hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum tingkat Kabupaten/Kota berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pekerja sehingga uang gaji yang dibayarkan kepada para pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Semakin tinggi Upah Minimum tingkat Kabupaten/Kota, maka akan semakin berkurang tingkat kemiskinan yang ada dikarenakan taraf hidup sudah membaik.
4. Hubungan negatif dan signifikan kesehatan (AHH) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesehatan masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah, baik dari sarana dan prasarana yang

harus ditingkatkan, juga untuk mutu, kualitas dan pelayanan yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Di samping itu perlu penekanan biaya berobat bagi masyarakat kurang mampu sehingga harapannya kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dapat merata dan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kesehatan, sehingga masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Periode waktu yang singkat dalam penelitian ini yaitu 5 tahun dari tahun 2012-2016, diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menambah periode waktu sehingga dapat menghasilkan kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang lebih nyata.
3. Objek dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu diperluas lagi untuk tingkat seluruh pulau Jawa atau tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija. 2011. Dasar-Dasar Ekonometrika. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amelia, R. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah*. Hal 50-53.
- Ardianto. 2016. Pengaruh Pengangguran, IPM dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmiah*. hal. 115-120.
- Arsyad, Lincoln. 1993. Pengantar Perencanaan Ekonomi. Edisi Pertama. Yogyakarta: Media Widya Mandal.

- Arsyad, Lincoln. 2004. Pengantar Perencanaan Ekonomi. Edisi Keempat. Yogyakarta: Media Widya Mandal.
- Astuti, R. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012. *Jurnal Ilmiah*, hal 6-10.
- _____. 2004. Ekonomi Pembangunan Edisi ke 4. Yogyakarta: UPP STIM TKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Data dan Informasi Kemiskinan Indonesia*
- . 2012. *Jawa Tengah Dalam Angka 2012*.
 - . 2013. *Jawa Tengah Dalam Angka 2013*.
 - . 2014. *Jawa Tengah Dalam Angka 2014*.
 - . 2015. *Jawa Tengah Dalam Angka 2015*.
 - . 2016. *Jawa Tengah Dalam Angka 2016*.
- Chriswardani, Suryawati. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. JMPK vol 08,(No.03) : hal. 121-129. Dilihat dari www.Scribd.com. Diakses pada tanggal 08 September 2017.
- Djalal, Nachrowi. 2016. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UII.
- Faturrohmin, R. 2011. Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fatony, Achmad. 2011. *Kebijakan Berbasis Partecipator Poverty Assesment, Kasus Yogyakarta*. Jurnal: Sosiokonsepsia, Vol. 16 No. 02.
- Gujarati, Damodar, N. 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar, N. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika Buku II. Jakarta: Salemba Empat.
- Hudaya. 2009. Pengentasan Kemiskinan Indonesia. Jakarta: Grafindo.
- Hudiyanto. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Istifaiyah, Lailatul. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013, *Jurnal Ilmiah*, hal. 1-19.
- Jundi. 2014. Teori Upah Minimum Edisi V. Yogyakarta: BPFE
- Kadji, Yulianto. 2009. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG.

- Khabhibi. 2010. Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan Tahun 2009-2013, *Jurnal Ilmiah*, hal. 1-23.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Tiga Aspek Kemiskinan*. Yogyakarta: FE UII
- _____. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mankiw. 2006. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.
- Mardimin, Yohanes. 1996. *Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nachrowi. 2006. *Statistik I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Nopirin. 1992. *Ekonomi Moneter Buku I*. Yogyakarta : BPFE
- _____. 1993. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE
- Priyo Adi. 2015. Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: FE.UNY
- Saragih, Juli, Panglima. 2014. *Faktor Penyebab dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menghapus Kemiskinan*. *Jurnal Ilmiah JESP-Vol. 6, No 2*.
- Sholehah, Ida. 2016. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Kabupaten/Kota Adm di Provinsi DKI Jakarta) Periode 2008-2014*. *Jurnal Ilmiah*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Simanjuntak. 1985. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta : FE.UI
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Buku I*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta: Grafindo Persada.
- _____. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Hal 381. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.
- Sukmaraga, Prima. 2011. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB perkapita dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Prov. Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah*, hal 22-26.
- Sumarlin. 2010. *Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota*. Semarang: UNDIP.
- Sumarsono. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sumodiningrat. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Supardi. 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI).
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan Edisi I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryawati. 2005. Pengaruh IPM, Tenaga Kerja dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 1984-2014, *Jurnal Ilmiah*, hal. 12.
- Todaro, Michael. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- . 2011. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas/Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Tri Basuki, Agus,. Imamudin Yuliadi. 2015. *Electronic Data Processing (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Danisa Media
- Widarjono. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya: Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wiguna. 2013. Pengaruh Kesehatan, Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus 2010-2012), *Jurnal Ilmiah*, hal. 12-22.
- Wijayanti, Asri. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanto. 2010. Dampak Lingkaran Kemiskinan. Yogyakarta: BPFE.
- Winarno, Budi. 2014. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- _____. 2014. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- Yoga Permana, Anggit. 2012. Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009. Jurnal. Semarang: UNDIP.